



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 42 TAHUN 2015  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN KEGIATAN PEKERJAAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Kegiatan Pekerjaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KEGIATAN PEKERJAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Standar Harga Satuan Kegiatan Pekerjaan (HSKP) Tahun 2016 berlaku umum bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal ...

Pasal 2

Standar Harga Satuan Kegiatan Pekerjaan (HSKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2016.

Pasal 3

Standar Harga Satuan Kegiatan Pekerjaan (HSKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah:

- a. Standar Harga Satuan Kegiatan Pekerjaan (HSKP) merupakan pembakuan biaya kegiatan fisik melalui analisis yang telah distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang, dan upah / honorarium sebagai elemen penyusunan Anggaran Kegiatan;
- b. merupakan standar Harga Satuan Kegiatan Pekerjaan (HSKP) tertinggi yang didalamnya belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dapat disesuaikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- c. merupakan standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- d. berfungsi sebagai referensi kewajaran perhitungan Biaya Perencanaan (DED Fisik) dan merupakan perhitungan satuan pokok pekerjaan;
- e. merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri / *Owner Estimate* (HSKP / *OE*) disamping tetap melihat harga pasar;
- f. merupakan salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang / jasa.

Pasal ...

Pasal 4

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 3 November 2015  
BUPATI KUTAI TIMUR,

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Ir. Hj. Yulianti	Plt. Sekda	
2.	Drs. H. Syafruddin, MAP	Ass. I	
3.	Nora Ramadani, SH.,MH	Plt. Kabag. Hukum	
4.	NOVIARI NOOR, ST., MT	KABAG BANGUNAN	



H. ARDIANSYAH SULAIMAN



HARGA SATUAN PEKERJAAN (UNIT PRICE) SUB BIDANG BINA MARGA

No. Mata Pembayaran	URAIAN JENIS PEKERJAAN/ KEGIATAN	Satuan	Satuan Harga di Kabupaten / Kota			
			KUTAI TIMUR			
			Zone I	Zone II	Zone III	Zone IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.1.(3)	Tukang Kayu, Tukang Batu, dsb	Jam	27,600.00	30,228.57	29,735.71	30,721.43
9.1.(4) a	Dump Truck, kapasitas 3 - 5 m <sup>3</sup>	Jam	400,076.00	481,000.00	490,000.00	498,000.00
9.1.(4) b	Dump Truck, kapasitas 6 - 8 m <sup>3</sup>	Jam	520,098.80	625,300.00	637,000.00	647,400.00
9.1.(5) a	Truk Bak Datar 3 - 4 ton	Jam	686,425.58	711,253.44	709,906.03	731,331.07
9.1.(5) b	Truk Bak Datar 6 - 8 ton	Jam	858,031.98	889,066.80	887,382.54	914,163.84
9.1.(6)	Truk Tangki 3000 - 4500 Liter	Jam	393,805.20	410,078.79	408,731.38	421,252.83
9.1.(7)	Bulldozer 100 - 150 PK	Jam	503,957.34	518,689.70	518,689.70	534,023.66
9.1.(8)	Motor Grader min 100 PK	Jam	507,602.02	527,202.27	525,854.86	541,838.81
9.1.(9)	Loader Roda Karet 1.0 - 1.6 M <sup>3</sup>	Jam	536,711.45	552,604.84	551,257.43	563,383.17
9.1.(10)	Loader Roda Berantai 75 - 100 PK	Jam	296,265.08	309,687.24	308,339.83	317,893.42
9.1.(11)	Alat Penggali (Excavator) 80 - 140 PK	Jam	501,099.34	520,509.50	519,162.09	534,948.18
9.1.(12)	Crane 10 - 15 Ton	Jam	517,356.03	537,241.42	535,894.01	552,174.75
9.1.(13)	Penggilas Roda Besi 6 - 9 Ton	Jam	335,281.13	349,843.86	348,496.45	359,237.18
9.1.(14)	Penggilas Bervibrasi 5 - 8 Ton	Jam	335,281.13	349,843.86	348,496.45	359,237.18
9.1.(15)	Pemadat Bervibrasi 1.5 - 3.0 PK	Jam	87,268.47	94,573.38	93,225.97	96,412.50
9.1.(16)	Penggilas Roda Karet 8 - 10 Ton	Jam	395,430.87	411,751.98	410,404.58	422,975.49
9.1.(17)	Kompresor 4000 - 6500 Ltr/mnt	Jam	263,751.70	276,223.39	274,875.98	283,440.28
9.1.(18)	Mesin Pengaduk beton (Molen) 0.3 - 0.6 M <sup>3</sup>	Jam	147,807.59	156,857.57	155,510.16	160,513.02
9.1.(19)	Pompa Air 70 - 100 mm	Jam	88,179.49	95,518.61	94,171.20	97,393.34
9.1.(20)	Jack Hammer	Jam	68,671.45	75,440.29	74,092.88	76,721.45

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Ir. Hj. Yulianti	Plt. Sekda	
2.	Drs. H. Syafruddin, MAP	Ass. I	
3.	Nora Ramadani, SH, MH	Plt. Kabag Hukum	
4.	Noviari Noor, ST, MT	Kabag. Pembangunan	

BUPATI KUTAI TIMUR

H. ARDIANSYAH SULAIMAN